



STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN

Buku Referensi



Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME
Prof. Dr. H. M Rachmad R, SE, MS
Dr. Muhammad Jakfar, SE, MM

BUKU REFERENSI
STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN

Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME
Prof. Dr. H. M Rachmad R, SE, MS
Dr. Muhammad Jakfar, SE, MM



BUKU REFERENSI
STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN

Penulis

Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME
Prof. Dr. H. M Rachmad R, SE, MS
Dr. Muhammad Jakfar, SE, MM

Editor

Drs. Marzul Hidayat, M.A., Ph.D.
Dr. Faradilla Herlin, S.E., M.E.

Desain Sampul dan Tata Letak
Kevin

Diterbitkan Oleh :

UNJA Publisher

Alamat Redaksi :

LPPM Universitas Jambi

Kampus UNJA Pinang Masak

Jl. Raya Jambi – Ma. Bulian KM 15

Mandalo Darat Jambi

Email : unjapublisher@unja.ac.id

Website : www.unjapublisher.unja.ac.id

Telp. : (0741) 582965

ISBN : 978-623-88984-6-6

Cetakan Pertama, Maret 2025

Copyright @2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan persoalan yang sulit dituntaskan termasuk kemiskinan di perkotaan. Diperlukan strategi yang tepat dan aplikatif bagi penanggulangan kemiskinan di perkotaan sehingga jumlah penduduk miskin di perkotaan di kurangi. Oleh karena itu rumusan strategi penanggulangan kemiskinan harus dilengkapi dengan model dan program yang terintegrasi dan mudah dilaksanakan dilapangan agar persoalan kemiskinan di perkotaan dapat diselesaikan.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman sejawat untuk referensi akademis dan dapat berguna bagi para pengambil keputusan untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan. Akhir kata penulis berpengharapan kepada para pembaca yang budiman untuk mengkritisi dan memanfaatkan nilai guna buku ini di kemudian hari. Terima Kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KONSEPSI KEMISKINAN	
2.1. Kemiskinan	3
2.1.1. Kemiskinan Absolut.....	7
2.1.2. Kemiskinan Relatif	8
2.2. Kemiskinan Perkotaan	9
2.3. Indikator kemiskinan	10
2.4. Model Pengukuran Perkotaan	11
2.5. Pengentasan Kemiskinan Perkotaan ...	18
BAB III KONDISI KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi Kasus Kota Sungai Penuh)	
3.1. Rumah Tangga Miskin	21
3.2. Karakteristik Rumah Tangga Miskin ..	21
3.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	29
3.4. Kemiskinan dan Pengangguran.....	30
3.5. Kemiskinan dan IPM	30
3.6. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi	31
3.7. Permasalahan Penduduk Miskin	32

BAB IV SOLUSI DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
4.1. Solusi Penanggulangan Kemiskinan..	34
4.2. Strategi Terobosan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	44
4.2.1. Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru.....	44
4.2.2. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	47
4.2.3. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan SMK dan Politeknik Berbasis Kompetensi Daerah	49
4.2.4. Strategi Pengembangan BUMD.....	51

**BAB V MODEL PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

5.1. Model Penanggulangan Kemiskinan ..	53
5.1.1. Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Produktif.....	53
5.1.2. Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	55
5.1.3. Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Cacat	57
5.1.4. Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Persampahan	59

5.2. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	60
5.2.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur	60
5.2.2. Program dan Kegiatan Peningkatan Kesehatan.....	62
5.2.3. Program dan Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Latihan	64
5.2.4. Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi	65
5.2.5. Program dan Kegiatan Ekonomi Program Kemitraan Usaha	66
BAB V PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	70

Bab 1

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan oleh karena itu dibutuhkan cara penanggulangan kemiskinan dengan analisis yang tepat dan melibatkan semua komponen permasalahan. Berarti, diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat sementara.

Akibat dari proses pembangunan, yang mengutamakan capaian pertumbuhan ekonomi daerah maka tersisanya masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi tidak hanya di daerah perdesan namun juga ditemui di daerah perkotaan yang berkategori lebih memiliki potensi sumber daya ekonomi. Kondisi demikian juga terjadi di perkotaan dimana masalah kemiskinan menjadi permasalahan kota yang perlu diperhatikan.

Diperlukan suatu kajian yang komprehensif dalam upaya menekan tingkat kemiskinan tersebut. Kajian yang dimaksud harus dimulai dari pengidentifikasian potensi dan permasalahan yang ditemui pada daerah dimana masyarakat miskin dominan berdomisili. Kemudian kajian akan dilanjutkan pada menemui akar permasalahan dan penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat miskin tersebut. Pada akhirnya dapat dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang komprehensif dan aplikatif untuk dilaksanakan instansi teknis dalam rangka pengurangan penduduk miskin di perkotaan.

Kesuksesan kepemimpinan sebuah Kota tidak akan lepas dari indikasi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan masyarakatnya di samping keberhasilan Kepemimpinan kota untuk mensejahterakan masyarakatnya secara merata. Kemiskinan memberikan dampak negatif ke semua sektor. Kemiskinan akan mendorong dan meningkatkan pengangguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya

bencana social, dan akan menghambat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam yang dapat memberikan gambaran solusi yang aplikatif bagi penanganan atau pengentasannya dalam bentuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan bertujuan untuk merumuskan solusi dan strategi penanggulangan kemiskinan perkotaan dan merancang model dan program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Strategi Penanggulangan Perkotaan diharapkan memberi manfaat bagi Pemerintah Kota mempercepat pencapaian visi –misi pembangunan Kota melalui strategi penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Sebagai acuan standar bagi instansi teknis terkait dalam pembuatan rencana strategis dan program yang terpadu dalam penanggulangan masalah penduduk miskin di Perkotaan.

Bab 2

Konsepsi Kemiskinan

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan juga diartikan sebagai komunitas yang pendapatannya berada di bawah satu garis kemiskinan. Akibatnya sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga meliputi berbagai masalah sosial lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu:

1. Kemiskinan sub sistem, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.

3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4. Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbaruan antara kelompok sosial, teragmentasi.
6. Kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak percaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Pada bagian lain, kemiskinan dikelompokkan ke dalam 12 kategori, yaitu :

- 1) Kemiskinan ditinjau dari aspek pengeluaran
- 2) Kemiskinan ditinjau dari aspek pendapatan
- 3) Kemiskinan ditinjau dari aspek pendidikan
- 4) Kemiskinan ditinjau dari aspek kesehatan
- 5) Kemiskinan ditinjau dari aspek ketenagakerjaan
- 6) Kemiskinan ditinjau dari aspek struktur usaha
- 7) Kemiskinan ditinjau dari aspek ketidakberdayaan
- 8) Kemiskinan ditinjau dari penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 9) Kemiskinan ditinjau dari aspek kondisi pembangunan manusia
- 10) Kemiskinan ditinjau dari aspek pembangunan, pemberdayaan dan ketimpang jender.
- 11) Kemiskinan ditinjau dari aspek kesenjangan antar golongan dan antar wilayah
- 12) Kemiskinan ditinjau dari aspek kondisi kemiskinan sementara dan kronik.

Secara konseptual kemiskinan adalah tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang dimaksud kebutuhan dasar adalah kebutuhan dasar minimum yang terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

Kemiskinan dimaknakan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik atau sosial. Kekurangan fisik meliputi ketidak

cukupan dalam kebutuhan dasar materi dan biologis, termasuk kekurangan dalam nutrisi, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Sedangkan ketidak cukupan sosial meliputi yang lebih luas, yaitu kerentanan, ketidak berdayaan dan ketidak mampuan menyampaikan informasi.

Sedangkan generalisasi yang paling tepat tentang kemiskinan adalah mereka yang ditempatkan di daerah pedesaan secara tidak seimbang dan terutama sekali mereka yang bekerja di bidang pertanian atau kegiatan-kegiatan usaha bersama.

Pada sisi lain, kemiskinan umum dapat dilihat dari dua sudut. Pertama kemiskinan sebagai proses dinamis, kompleks dan beragam, kemiskinan itu sendiri dapat disebabkan oleh rendahnya mutu modal manusia, pendapatan dan konsumsi yang rendah serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi dan tingkat pengembalian terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Kedua, kemiskinan sebagai akibat dan memberikan kontribusi terhadap kebersihan atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik dan ekonomi. Salah satu bentuk dari proses marginalisasi dapat tercermin dari sisi gender etnik ataupun kelas masyarakat.

Kemiskinan masal yang terjadi di banyak Negara disebabkan oleh keterbelakangan dari perekonomian Negara tersebut sebagai akar permasalahannya. Penduduk Negara tersebut miskin karena menggantungkan dari sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang sering kali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal kemiskinan. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal ini terjadi akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari

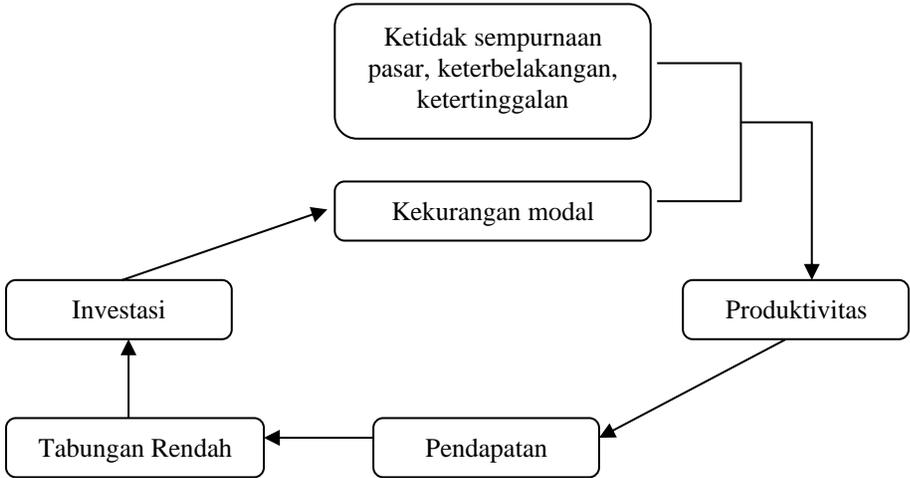
keterbatasan lapangan kerja dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.

Hubungan saling pengaruh antara berbagai aspek kemiskinan tersebut dapat langsung maupun tidak langsung, dan dapat merupakan suatu lingkaran yang sulit dicari ujungnya. Dengan demikian tidaklah terlalu sulit untuk menduga bahwa kemajuan atau kemunduran salah satu aspek penyebab kemiskinan akan menyebabkan perkembangan yang baik atau kemunduran dari aspek yang lain. Oleh karena itu untuk mengamati kemiskinan perlu adanya suatu ukuran atau indikator tertentu. Karena kemiskinan muncul tidak saja disebabkan oleh kedudukan dan perilaku masing-masing individu, tetapi juga kedudukan dan perilaku kelompok yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, pada seksi ini akan dibahas dua pokok bahasan, yang pertama kemiskinan absolut dan yang kedua kemiskinan relatif.

Faktor penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

- a. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan.



Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse :

Kemiskinan merupakan suatu lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya berputar.

2.1.1 Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan absolut ini bermaksud memberi indikator mengenai keadaan perekonomian suatu daerah yang sebagian penduduknya mendapatkan nafkah yang hanya dapat dipakai untuk memenuhi taraf kehidupan minimum. Konsep ini memberi arti bahwa kemiskinan absolut berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar minimum agar seseorang dapat hidup layak.

Jika seseorang mempunyai pendapatan dan tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum sering disebut juga garis batas kemiskinan. Konsep

ini kerap kali dipakai untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang dapat dipakai seseorang untuk memenuhi kebutuhannya akan makan pakaian dan perumahan yang diharapkan mampu menjamin kehidupannya. Dari sini akan tidak terlalu sulit untuk mengatakan, bahwa orang yang miskin akan nampak pada kurangnya bahan makanan, pakaian dan perumahan yang dimiliki seseorang atau kelompoknya agar mereka dapat hidup layak.

Permasalahan yang sering muncul dari konsep kemiskinan absolut adalah bagaimana menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum. Sebab kedua aspek tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya adat istiadat lokasi, iklim, tingkat kemajuan masyarakat dan faktor-faktor lain. Sayogyo (1971), menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per kapita per tahun. Secara lebih terperinci Sayogyo membagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 kelompok.

Tabel 2.1 Kriteria Kemiskinan menurut Sayogyo

Kriteria	Pedesaan	Perkotaan
1. Melarat	180 kg	270 kg
2. Sanagt Miskin	240 kg	360 kg
3. Miskin	320 kg	480 kg

2.1.2 Kemiskinan Relatif

Konsep kemiskinan absolut di atas telah membicarakan kriteria yang dapat menentukan apakah seseorang atau kelompok tertentu dapat dikategorikan miskin atau tidak. Pada prinsipnya, orang yang sudah mempunyai pendapatan dan pendapatannya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka yang

bersangkutan dikatakan tidak miskin. Namun demikian banyak ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Misalnya saja, satu keluarga tinggal di daerah perkotaan dan pada tahun 1987 mempunyai pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 1 5.000,-. Menurut kriteria BPS (1 989), dia dapat dikategorikan tidak miskin. Namun demikian bila pendapatan rata-rata masyarakat disekitarnya Rp 50.000,- per bulan per kapita, maka diapun mendapat predikat "miskin".

Berdasarkan konsep dan contoh di atas nampak bahwa kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Konsep di atas sering disebut sebagai kemiskinan relatif dan merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif biasanya bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Kriteria ini akan nampak bila kita mengamati distribusi pendapatan masyarakat.

2.2 Kemiskinan Perkotaan

Permasalahan kemiskinan di daerah perkotaan, merupakan hal yang menarik untuk digali. Kemiskinan perkotaan (urban poverty) mempunyai permasalahan yang kompleks baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif kebijakan untuk mengatasinya. Kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial ekonomi yang cukup beragam dan tentunya implikasi kebijakannya akan semakin rumit. Tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (commodization), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (environmental hazards) dan kehidupan sosial yang individualisitas (social fragmentation).

Oleh karena itu, kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena multi dimensi meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan

dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi. Kemiskinan perkotaan sering dicirikan sebagai deprivasi kumulatif yaitu satu dimensi kemiskinan sering menjadi penyebab atau penyulut dari dimensi kemiskinan lainnya.

Rumah tangga miskin yang menempati lokasi kantong-kantong kemiskinan di perkotaan biasanya berada di sekitar daerah kumuh (slum area), daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Dimana lingkungan miskin biasanya sangat akrab dengan sumber polusi, kurangnya sumber air bersih, kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan areal yang sempit dan penuh dengan sampah rumah tangga, pencemaran limbah beracun dengan kerawanan munculnya penyakit dan wabah yang kadang berujung cacat mental maupun fisik bahkan kematian.

Tekanan kemiskinan yang melanda diperparah dengan rendahnya kesadaran warga untuk hidup sehat semakin memperburuk kualitas lingkungan. Berdasarkan dimensi kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya, penduduk miskin perkotaan memiliki ciri kemiskinan yang paling menonjol di antara karakteristik kemiskinan secara keseluruhan (kemiskinan perkotaan dan pedesaan) yaitu penduduk miskin kota rentan terhadap kemiskinan dan kemiskinan dari segi non-pendapatan dengan penjelasan berikut:

1. Penduduk miskin kota rentan terhadap kemiskinan (kerentanan)
2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan (multi-dimensi)
3. Pemberdayaan sumberdaya manusia
4. Peningkatan aset dasar masyarakat miskin
5. Penciptaan dan pengembangan pasar
6. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik

2.3 Indikator Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan dapat digunakan lima versi indikator kemiskinan, sebagai berikut:

- a. Versi Bank Dunia; kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin

- adalah mereka yang berpendapatan maksimal UU\$ 2 per hari
- b. Versi International Labour Organization (ILO); Yaitu orang miskin di pedesaan jika pendapatan maksimal US\$ 0,8.
 - c. Versi BKKBN yang mendefinisikan kemiskinan dengan 5 indikator 1) Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya, 2) Seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, 3) Seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian, 4) Bagian terluas rumahnya terdiri atas tanah, 5) tidak mampu membawa keluarga jika sakit ke sarana kesehatan.
 - d. Versi Dinas Kesehatan menambahkan kriteria tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak.
 - e. Versi BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan minimal non makanan (sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). Disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan Rp. 175.324,- per bulan sebagai batas miskin perkotaan dan Rp. 131.256,- di pedesaan.

2.4 Model Pengukuran Kemiskinan

Di Indonesia terdapat beberapa model penghitungan kemiskinan, yaitu Model Tingkat Konsumsi, Model Kesejahteraan Keluarga dan Model Pembangunan Manusia.

1) Model Tingkat Konsumsi.

Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Beliau membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang pertahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras

per orang pertahun. Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar.

Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Selain itu BPS (1989) juga membuat kriteria garis batas kemiskinandengan memperhatikan pendapatan minimum yang diperlukan agar masyarakat atau kelompok dapat melepaskan diri dari kategori miskin. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan "garis kemiskinan" (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984.

Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional). Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah survey konsumsi dan belanja tingkat rumah tangga yang sebelumnya dimaksudkan untuk mencakup seluruh provinsi di Indonesia agar dapat memberikan gambaran tingkat nasional. Namun karena keterbatasan biaya dan tenaga, tahun 1963 dan 1967 Susenas hanya mencakup Jawa. Untuk tahun tahun yang lain, termasuk tahun 1964/1965.

Tapi sejak tahun 1981, karena adanya tambahan beberapa topik (modul), Susenas dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) Susenas Kor yang dibuat setiap tahun dan (b) Susenas Modul yang dibuat setiap tiga tahun. Susenas Kor menyajikan data yang umum seperti sayur, sedangkan Susenas Modul menyajikan data yang rinci, misalnya wortel. Konsumsi masyarakat masuk ke modul dan dibuat setiap tiga tahun. Oleh karena itu setelah tahun 1980 data tingkat

konsumsi tersedia pada tahun 1981, 1984, 1987, 1990 dan 1993.

Sampai dengan 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional. Baru pada tahun 1990 dapat dilakukan pada tingkat Provinsi, meskipun untuk beberapa Provinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat Provinsi secara keseluruhan.

Sebelum tahun 1993, jumlah sampel Susenas berubah dari waktu ke waktu. Empat Susenas yang pertama (1963, 1964/65, 1967, 1969/70) dan Susenas tahun 1978 dirancang untuk menghasilkan perkiraan nasional dan regional (gabungan beberapa provinsi), sementara ukuran sampel untuk tahun-tahun yang lain diyakini dapat mewakili tingkat Provinsi. Sejak tahun 1993, ukuran sampel meningkat sampai dengan lebih dari 200.000 rumah tangga, dari 65.000 rumah tangga pada tahun 1992.

Sebelum tahun 1992, sampel Susenas hanya di bawah 60.000 rumah tangga. Namun penambahan sampel tersebut hanya untuk kuisioner kor, sementara untuk kuisioner modul (termasuk konsumsi) jumlah sampel masih 65.000 rumah tangga. Sejak tahun 1999, dengan menggunakan data Susenas telah dihitung pula penduduk miskin pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi dengan sampel yang kurang. Karena Susenas hanya dapat memprediksi angka kemiskinan sampai tingkat Provinsi. maka untuk kabupaten yang menginginkan data yang lebih rinci dan lebih tepat di wilayahnya dapat membuat Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Barat. Suseda tidak dibuat secara teratur, melainkan dibuat atas dasar permintaan pemerintah kabupaten atas biaya pemerintah kabupaten sendiri yang dijalankan oleh BPS.

Pada prinsipnya metodologi Suseda sama dengan Susenas hanya saja jumlah sampel jauh lebih banyak. Garis kemiskinan di daerah perkotaan yang lebih besar daripada di daerah pedesaan terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan minimum masyarakat perkotaan tidaklah sama dengan masyarakat di daerah pedesaan. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mempunyai

kebutuhan yang relatif lebih banyak dan beragam bila dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Dari dua contoh di atas sekilas nampak, bahwa konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti, akan tetapi menentukan garis kemiskinan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal itu disebabkan oleh banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain atau antara negara yang satu dengan negara lainnya.

2) Model Kesejahteraan Keluarga.

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey pada BPS digunakan rumah tinggal sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini tentunya sejalan dengan visi program Keluarga Berencana (KB) yaitu “ Keluarga yang Berkualitas”.

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dll;

Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III. Data kemiskian dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

- I. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin)
 - II. Keluarga Sejahtera I (miskin)
 - III. Keluarga Sejahtera II
 - IV. Keluarga Sejahtera III
 - V. Keluarga Sejahtera III plus
- ❖ Tahapan Pra Sejahtera;
Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
 - ❖ Tahapan Keluarga Sejahtera I;
Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
 - 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan;
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan
 - 6) kontrasepsi;
 - 7) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
 - ❖ Tahapan Keluarga Sejahtera II
 - 1) Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga
 - 2) Sejahtera I (indikator 1 s/d 6) dan indikator berikut;
 - 3) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan
 - 4) agama dan kepercayaan masing-masing;
 - 5) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan
 - 6) daging/ikan/telur;
 - 7) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian
 - 8) baru dalam setahun;

- 9) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah;
- 10) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat
- 11) melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
- 12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh
- 13) penghasilan;
- 14) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin;
- 15) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

❖ Tahapan Keluarga Sejahtera III ;

Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 s/d 14) dan indikator berikut;

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

❖ Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus;

Adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 s/d 19) dan indikator berikut;

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

3) Model Pembangunan Manusia.

Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu: United Nation Development Program (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selanjutnya mengembangkan model ini. HDR yang pertama dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 1993. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai “Pembangunan Manusia Seutuhnya”.

Laporan terakhir tahun 2004 yang menjelaskan keadaan pada tahun 1999 dan 2002. HDR berisikan penjelasan tentang empat index yaitu index Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender Development Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI).

HDI dengan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat daya beli perkapita. HPI, dengan indikator kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan, dan persentase balita yang kurang makan.

GDI, indikatornya adalah tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Sedangkan GEM indikatornya adalah persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan, persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan

perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.

Pengukuran angka kemiskinan dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengukur pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling esensial-lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks tersebut dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

b. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Mengukur dimensi yang berlawanan arah dari IPM, yaitu seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal (*deprived people*), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut dihitung menggunakan persentase penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk buta huruf, persentase balita dengan status gizi kurang, persentase balita dengan status gizi kurang, persentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin tinggi.

c. Indeks Kehidupan Fakir Miskin

Mengukur kesenjangan pencapaian, yaitu berapa upaya, dalam persentase, yang masih harus dilakukan/dicapai untuk membawa kondisi kehidupan fakir miskin di suatu wilayah menuju standar kehidupan minimum yang layak. Dimensi yang diukur mencakup (1) situasi kelaparan atau sangat kurang kalori, (2) Kualitas hidup fakir miskin, (3) Akses fakir miskin pada pelayanan sosial dasar dan pembangunan.

2.5 Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Terdapat tiga metode mengentaskan kemiskinan yaitu melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan masyarakat dan mekanisme pengeluaran pemerintah. Masing-masing metode tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri

utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah. Pengentasan kemiskinan yang efektif bagi kemiskinan perkotaan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang bermanfaat bagi rakyat miskin;

Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Strategi membantu masyarakat miskin menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa unsur :

- Pertama, penting untuk memelihara stabilitas makro ekonomi: kuncinya adalah inflasi rendah dan nilai tukar yang stabil dan kompetitif.
- Kedua, masyarakat miskin perlu dihubungkan dengan peluang pertumbuhan. Akses lebih baik terhadap jalan, telekomunikasi, kredit dan pekerjaan di sektor formal dapat dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Manfaat penyediaan infrastruktur adalah kesempatan kerja dan distribusi barang produksi.
- Melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin. Strategi pertumbuhan harus terdiri dari investasi bagi masyarakat miskin, yakni menyiapkan mereka agar bisa dengan baik memetik manfaat dari berbagai kesempatan bagi pertumbuhan pendapatan yang muncul di depan mereka.

2. Menyediakan layanan sosial yang bermanfaat bagi rakyat miskin

- Pertama, Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya angka kematian bayi yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin.
- Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia diberbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat

miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah.

3. Mekanisme pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat miskin

Pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, menentukan mekanisme pengeluaran untuk rakyat miskin. Pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan.

- Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada.

Bab 3

Kondisi Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus Kota Sungai Penuh)

3.1. Rumah Tangga Miskin

Kota Sungai Penuh memiliki rumah tangga miskin sebanyak 3.515 rumah tangga. Sebaran rumah tangga miskin tersebut terbanyak tersebar pada Kecamatan Hamparan Rawang sebanyak 846 rumah tangga (24,00%), Kecamatan Kumun Debai sebanyak 575 rumah tangga (16,30%), Kecamatan Koto Baru sebanyak 541 rumah tangga (15,30%), dan Kecamatan Tanah Kampung sebanyak 515 rumah tangga (14,60%). Sisanya tersebar pada 4 kecamatan lainnya (Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, dan Pesisir Bukit).

Kondisi ini menggambarkan pula bahwa 4 kecamatan tersebut (Hamparan Rawang, Kumun Debai, Koto Baru, dan Tanah Kampung) merupakan sentra kemiskinan di Kota Sungai Penuh. Berarti fokus program dan kegiatan pengentasan kemiskinan juga ditujukan kepada 4 kecamatan tersebut sebagai sentra kemiskinan.

Berdasarkan kategori kemiskinan, maka didapati 722 rumah tangga sangat miskin (20,50%), 1396 rumah tangga miskin (39,70%) dan 1397 rumah tangga hampir miskin (39,70%) di Kota Sungai Penuh. Sebaran rumah tangga sangat miskin berada pada Kecamatan Hamparan Rawang sebanyak 167 rumah tangga (23,10%) dan Kecamatan Koto Baru sebanyak 146 rumah tangga (20,20%).

Deskripsi lebih rinci tentang sebaran rumah tangga miskin menurut kecamatan dan kategori miskin dimuat pada tabel berikut ini.

3.2. Karakteristik Rumah Tangga Miskin

3.2.1 Pendidikan Anak

Pendidikan anak-anak pada keluarga rumah tangga miskin terlihat tidak begitu jelek karena anak-anak dan

orangtuanya cukup antusias terhadap pendidikan. Kendatipun keluarga mereka kategori rumah tangga miskin tetapi didapati anaknya kuliah di Perguruan Tinggi sebanyak 5,56%. Kondisi ini yang mendukung tingginya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Sungai Penuh dan bahwa IPM tertinggi di tingkat Provinsi Jambi.

Deskripsi pendidikan anak pada rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Pendidikan Anak Pada Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Pendidikan	Jumlah Orang	%
1	SD/MI	2.395	54,31%
2	SLTP	1.047	23,74%
3	SLTA	723	16,39%
4	Perguruan Tinggi	245	5,56%
	Jumlah	4.410	100,00%

Tabel diatas menyajikan populasi terbesar pendidikan yang tengah ditempuh anak-anak keluarga rumah tangga miskin adalah SD/MI sebesar 54,31% dan SLTP sebesar 23,74%. Berarti anak-anak pada rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh telah mengikuti program wajib belajar 9 tahun.

3.2.2 Bekerja Dan Tidak Bekerja

Kondisi tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur pada keluarga rumah tangga miskin cukup besar yaitu 56,60% dari tenaga kerja yang tersedia pada rumah tangga miskin. Angka pengangguran tersebut cukup besar dan mayoritas beusia produktif. Penganggur terbesar yang berusia dibawah 15 tahun sebanyak 45,85% sedangkan yang berusia antara 16-60 tahunj sebanyak 46,31%. Deskripsi penduduk yang bekerja atau tidak bekerja pada keluarga rumah tangga miskin dimaut pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja Pada Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Usia	Bekerja		Tidak Bekerja	
		Orang	%	Orang	%
1	< 5 - 15 tahun	13	0,21%	3.694	45,85%
2	16 - 60 tahun	5.484	89,11%	3.731	46,31%
3	60 > tahun	657	10,68%	632	7,84%
	Jumlah	6.154	100,00%	8.057	100,00%

Sajian data di atas memperlihatkan bahwa hanya sedikit penduduk usia lanjut (60 > tahun) yang bekerja (10,68%) dan tidak bekerja (7,84%). Usia tidak produktif masih didapati bekerja untuk menambah pendapatan keluarga pada rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh.

3.2.3. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan menggambarkan status sosial adalah janda atau suaminya tidak mampu lagi bekerja. Pada Kota Sungai Penuh didapati sebanyak 14,70% dari rumah tangga miskin yang kepala keluarganya adalah perempuan. Perempuan sebagai ibu dari anak-anak sekaligus kepala keluarga yang mencari pendapatan buat keluarga. Tanggungjawab perempuan tersebut amat besar terhadap rumah tangga miskin. Deskripsi tentang kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Kepala Rumah Tangga Perempuan Pada Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Usia	Jumlah Rumah Tangga	%
1	45 < tahun	117	22,59%
2	45 - 60 tahun	253	48,84%
3	60 > tahun	148	28,57%
	Jumlah	518	100,00%

Data pada tabel di atas menyajikan bahwa mayoritas (48,84%) perempuan yang menjadi kepala rumah tangga

adalah berusia 45-60 tahun. Namun didapati pula usia yang sudah tua yaitu $60 >$ tahun sebanyak 28,57% dari total rumah tangga miskin.

3.2.4. Penderita Penyakit Kronis

Anggota keluarga pada rumah tangga miskin yang menderita penyakit kronis di Kota Sungai Penuh didapati sebanyak 504 orang. Mayoritas anggota keluarga tersebut sudah berusia tua ($60 \geq$ tahun) sebanyak 46,03%. Berarti penyakit kronis tersebut merupakan penyakit pada usia tua. Deskripsi tentang sebaran usia penderita penyakit kronis pada rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Penderita Penyakit Kronis Pada Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Usia Penderita	Jumlah Penderita (Orang)	%
1	15 < tahun	23	4,56%
2	15 - 44 tahun	106	21,03%
3	45 - 59 tahun	143	28,37%
4	$60 \geq$ tahun	232	46,03%
	Jumlah	504	100,00%

Paparan data diatas menyajikan bahwa anak-anak usia 15 tahun didapati menjadi penderita kronis yang perlu perhatian khusus kendatipun populasinya mat kecil (4,56%). Sedangkan usia produktif (15-59 tahun) didapati cukup besar yaitu sebanyak 49,06% dari populasi penderita penyakit kronis.

3.2.5 Penyandang Cacat

Penyandang cacat merupakan beban yang berat bagi rumah tangga miskin kerana mereka tidak produktif. Mayoritas (43,48%) penyandang cacat berusia produktif (15-44 tahun). kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus dengan memberi ketrampilan agar mereka dapat jadi produktif atau berguna bagi keluarganya. Deskripsi tentang

penyandang cacat pada rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Penyandang Cacat Pada Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Usia	Jumlah Orang	%
1	15 < tahun	25	13,59%
2	15 - 44 tahun	80	43,48%
3	45 - 60 tahun	36	19,57%
4	60 > tahun	43	23,37%
	Jumlah	184	100,00%

Gambaran data pada tabel diatas menyajikan bahwa penyandang cacat jua didapat berusia sangat muda (15<tahun) sebanyak 13,59%. Sedangkan yang berusia tua (60>tahun) sebanyak 23,37%. Untuk yang berusia sangat muda perlu diupayakan rekonstrukri instabilitasnya agar dimasa depan mereka dapat mandiri dan berguna bagi keluarganya.

3.2.6. Pemilikan Bangunan

Mayoritas (57,47%) rumah tangga miskin telah memiliki rumah sendiri baik warisan keluarga ataupun hasil pembelian mereka sendiri. Hanya 41,96% rumah tangga miskin yang masih menyewa atau mengontrak. Namun kondisi fisik rumahnya kategori tidak baik bahkan didapati tidak layak huni. Kemudian sanitasi rumah juga tidak sehat dan kotor sehingga menurunkan kualitas hidup rumah tangga miskin. Gambaran lebih detil tentang pemilikan bangunan oleh rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Pemilikan Bangunan Oleh Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Pemilikan	Jumlah Rumah Tangga	%
1	Sendiri	2.020	57,47%
2	Sewa/Kontrak	1.475	41,96%
3	Lainnya	20	0,57%

Jumlah	3.515	100,00%
---------------	--------------	----------------

Bangunan rumah milik rumah tangga miskin mayoritas terbuat dari kayu dengan usia bangunan yang sudah tua karena mayoritas warisan keluarga yang belum tersentuh oleh rehabilitasi bangunan. Oleh karena itu, program yang dibutuhkan adalah bedah rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

3.2.7. Sumber Penerangan

Mayoritas (82,30%) rumah tangga miskin telah dialiri listrik dari PLN. Hanya sedikit sekali (13,37%) yang rumahnya diterangi dengan lampu minyak tanah. Ini berarti rumah tangga miskin Kota Sungai Penuh telah terjangkau pelayanan PLN sehingga rumah mereka telah diterangi listrik.

Deskripsi penerangan listrik pada rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Sumber Penerangan Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Sumber	Jumlah Rumah Tangga	%
1	Listrik PLN	2.893	82,30%
2	Listrik Non PLN	152	4,32%
3	Tidak Ada Listrik	470	13,37%
	Jumlah	3.515	100,00%

Informasi dari tabel diatas memperlihatkan bahwa rumah tangga miskin yang dialiri listrik Non PLN berasal dari listrik Non PLN milik tetangga yang punya mesin pembangkit listrik sendiri. Pemakaian listrik tersebut atas kebaikan tetangga untuk membantu rumah tangga miskin.

3.2.8. Sumber Bahan Bakar

Hanya sedikit sekali (1,08%) rumah tangga miskin yang menggunakan sumber bahan bakar dari listrik/gas/LPG.

Sisanya (98,92%) menggunakan sumber bahan bakar dari minyak tanah dan kayu bakar. Khusus untuk sumber bahan bakar dari LPG, rumah tangga miskin sudah memiliki tabung gas ukuran 3 kg yang merupakan program nasional pengalihan minyak tanah ke gas (LPG). Rincian data tentang sumber bahan bakar pada rumah tangga miskin dimuat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Sumber Bahan Bakar Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Sumber	Jumlah Rumah Tangga	%
1	Listrik/Gas/LPG	38	1,08%
2	Lainnya	3.477	98,92%
	Jumlah	3.515	100,00%

Minimnya rumah tangga miskin menggunakan bahan bakar dari listrik/gas/LPG dapat dimaknai rendahnya kemampuan keuangan rumah tangga miskin untuk membeli gas/LPG. Akibatnya mayoritas (98,92%) rumah tangga miskin masih menggunakan minyak tanah atau kayu sebagai bahan bakar.

3.2.9. Sumber Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum maka rumah tangga miskin menggunakan sumber dari ledeng, kemasan, sumber terlindung dan tidak terlindung. Ledeng (PDAM) merupakan sumber utama karena 44,44% dari rumah tangga miskin adalah pelanggan PDAM melalui program MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah). Deskripsi tentang sumber air minum rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11. Sumber Air Minum Rumah Tangga Miskin
Kota Sungai Penuh**

No	Sumber	Jumlah Rumah Tangga	%
1	Ledeng	1.562	44,44%
2	Kemasan	68	1,93%
4	Sumber Terlindung	852	24,24%
3	Sumber Tidak Terlindung	1.033	29,39%
	Jumlah	3.515	100,00%

Paparan data di atas menyajikan pula bahwa 24,24% dari populasi rumah tangga miskin menggunakan sumur tertutup sumber terlindung sebagai sumber air minum. Akan tetapi didapati 29,39% dari rumah tangga miskin yang menggunakan sumber air minum yang kategori tidak baik yaitu sumber air yang tidak terlindungi sumur terbuka.

3.2.10. Fasilitas WC

Mayoritas (48,63%) rumah tangga tidak dapat mengakses WC baik WC umum ataupun WC milik sendiri. Berarti keluarga rumah tangga miskin menggunakan sungai/kali sebagai tempat pembuangan kotoran keluarga cukup banyak yaitu sebanyak 1.708 rumah tangga. Sedangkan yang memiliki WC sendiri hanya sebesar 27,75%. Deskripsi fasilitas WC yang dimiliki rumah tangga miskin dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12 Fasilitas WC Rumah Tangga Miskin
Kota Sungai Penuh**

No	Fasilitas	Jumlah Rumah Tangga	%
1	Sendiri	975	27,75%
2	Umum	830	23,63%
3	Tidak Ada	1.708	48,62%
	Jumlah	3.513	100,00%

Tabel diatas memperlihatkan hanya 23,63% dari rumah tangga miskin yang menggunakan WC umum untuk cuci,mandi dan kakus. Berarti diperlukan pembuangan WC umum lebih banyak lagi agar 48,62% dari rumah tangga yang tidak ada akses WC dapat mengakses WC umum.

3.2.11. Fasilitas Pembuangan Akhir Tinja

Mayoritas (78,63%) rumah tangga miskin tidak memiliki tangki/SPAL untuk menampung tinja keluarga. Hal ini sejalan dengan pemilikan WC milik sendiri juga kecil yaitu sebanyak 27,75% dari rumah tangga miskin. Berarti rumah tangga miskin mayoritas bangunan rumahnya tidak memiliki WC dengan septic tank untuk penampungan tinja keluarga. Deskripsi tentang pemilikan tangki pembuangan akhir tinja rumah tangga miskin di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Fasilitas Pembuangan Akhir Tinja Rumah Tangga Miskin Kota Sungai Penuh

No	Fasilitas	Jumlah Rumah Tangga	%
1	Tangki/SPAL	751	21,37%
2	Lainnya	2.764	78,63%
	Jumlah	3.515	100,00%

Gambaran data fasilitas pembuangan akhir tinja rumah tangga miskin maka perlu bantuan pembuatan WC keluarga dengan Septictank terintegrasi antar WC rumah tangga miskin. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan sanitasi rumah tangga miskin.

3.3. Indeks Kedalaman Dan Keperahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Sungai Penuh berfluktuasi searah dengan persentase jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,46 tetapi empat tahun kemudian (2022) menurun

menjadi 0,38. Namun pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,30 dan tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 0,53. Berarti indeks kedalaman kemiskinan mengalami naik turun selama 4 tahun terakhir.

3.4 Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan berhubungan erat dengan pengangguran, bila pengangguran meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Hal ini juga terjadi di Kota Sungai Penuh dimana trend kemiskinan searah dengan trend pengangguran. Oleh karena itu upaya mengurangi pengangguran adalah searah dengan upaya mengurangi kemiskinan.

Deskripsi data kemiskinan dan pengangguran di Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2024

No	Persentase	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Miskin	3,41	2,97	3,00	2,97
2	Pengangguran Terbuka	13,27	3,97	6,57	5,12

Paparan data diatas lebih detil menyajikan bahwa persentase penduduk miskin selama tahun 2010-2013 masih dibawah 4%. Namun tingkat pengangguran terbuka berkisar 3-14% dimana tahun 2010 merupakan tingkat pengangguran tertinggi yaitu sebesar 13,27%. Sedangkan pengangguran terendah terjadi ditahun 2011 sebesar 3,97%.

3.5 Kemiskinan dan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh cenderung meningkat setiap tahunnya. IPM Kota Sungai Penuh merupakan IPM tertinggi dilingkungan Provinsi Jambi. Namun IPM yang tertinggi tersebut tidak menghabiskan jumlah penduduk miskin di Kota Sungai Penuh. Terlihat tidak searah antara perkembangan IPM dengan kemiskinan. Kemiskinan Kota Sungai Penuh masih dibawah 4% tetapi IPM Kota Sungai Penuh terus meningkat.

Deskripsi persentase kemiskinan dan IPM Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15 Persentase Penduduk Miskin dan IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2024

No	Deskripsi	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk	3,41	2,97	3,00	2,92
2	IPM	71,63	77,00	74,00	76,65

Seharusnya peningkatan IPM Kota Sungai Penuh berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan melalui instrumen pendidikan dan kesehatan. Namun hal tersebut tidak terjadi karena aspek pendidikan tidak mengurangi aspek pengangguran dan pengangguranlah yang berhubungan dengan kemiskinan. Berarti pendidikan yang termuat dalam IPM tidak menghasilkan manusia siap kerja dan sesuai kebutuhan pasar.

3.6. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat mereduksi kemiskinan di Kota Sungai Penuh. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi seperti yang terlihat pada trend pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh cenderung meningkat tetapi persentase penduduk miskin tidak mengikuti kecenderungan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh yang trendnya meningkat tidak mampu menekan angka kemiskinan karena berfluktuasinya angka pengangguran. Dapat dimaknai pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat bersahabat dengan upaya mengurangi penduduk miskin. Gambaran detil tentang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 3.16. Persentase Penduduk Miskin dan
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2021-
2024**

No	Persentase	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Miskin	3,41	2,97	3,00	2,97
2	Pertumbuhan Ekonomi	3,67	4,44	4,92	4,92

Deskripsi diatas menginginkan, kedepan pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh harus berkualitas agar pertumbuhan yang tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh yang berkualitas akan dapat membantu rumah tangga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

3.7. Permasalahan Penduduk Miskin

Berdasarkan paparan kemiskinan diatas dan hasil pengamatan lapangan, maka penduduk miskin banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupannya sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, permasalahan penduduk miskin dipertegas kembali dalam bentuk rumusan seperti yang termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17 Rumusan Permasalahan Penduduk Miskin

No	Permasalahan
1.	Mayoritas (56,60%) penduduk tidak bekerja atau menganggur dengan usai sangat produktif (16-60 th) sebanyak 46,31%
2.	Mayoritas (48,84%) kepala rumah tangga adalah perempuan yang berusia 45-60 tahun
3.	Mayoritas (74,40%) penduduk miskin berusia 45>tahun menderita penyakit kronis
4.	Mayoritas (63,05%) penduduk miskin berusia produktif (15-60 tahun) adalah penyandang cacat
5.	Mayoritas rumah penduduk miskin tersebut adalah kayu yang sudah tua dan tidak layak huni
6.	Mayoritas (48,63%) rumah tangga miskin tidak dapat mengakses WC
7.	Keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan dan pasar

8.	Keterbatasan dalam pemilikan skill dan asset
9.	Keterbatasan dalam mengikuti percepatan perubahan sosial ekonomi dan politik

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis pada model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Strategi dan model pengembangan kemiskinan tersebut perlu pula dituangkan kedalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah diterapkan dan bersinergi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya baik ditingkat nasional maupun tingkat regional. Dengan harapan semua program dan kegiatan akan dapat mereduksi jumlah penduduk miskin melalui penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin tersebut.

Bab 4

Solusi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

4.1 Solusi Penanggulangan Kemiskinan

4.1.1 Solusi Umum Penanggulangan

Solusi penanggulangan kemiskinan terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari. Tugas kehidupan tersebut merupakan konsepsi yang dinamis. Oleh karena itu intervensi pengentasan senantiasa melihat perubahan orang miskin yang tidak terpisah dari lingkungan dan situasi kehidupannya. Strategi ini lebih menekankan pada pengentasan kemiskinan kepada:

1. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan. Strategi ini digunakan dalam mengatasinya adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
 - b) Pemberian jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
 - c) Pemberdayaan usaha mikro, dan pendistribusian bantuan kemanusiaan.

2. Pekerjaan sosial yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Strategi anti kemiskinan ini disesuaikan dengan kejadian masalah-masalah yang dihadapinya. strategi penanganan kemiskinan ini adalah:
 - a) Penanganan kedarurata melalui bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
 - b) Penanganan kesementaraan melalui bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produktif.

- c) Pemberdayaan melalui pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
- d) Penanganan bagian yang hilang. meliputi program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya dengan pemberian kredit usaha mikro.

4.1.2 Solusi Khusus Penanggulangan Kemiskinan

4.1.2.1 Solusi Pemenuhan Hak-Hak Dasar

1. *Pemenuhan Hak Atas Pangan*; Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang dilakukan melalui:
 - a) Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin melalui perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan tingkat upah dalam upaya pemenuhan dasar kebutuhan pangan.
 - b) Perluasan kesempatan melalui solusi yang diarahkan pada penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau
 - c) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
 - d) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui solusi peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.
 - e) Peningkatan perlindungan sosial melalui solusi yang diarahkan pada perlindungan dan jaminan kecukupan pangan pada kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.

2. *Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan;*
Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan:
 - a) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk realokasi anggaran kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
 - b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti malaria, rendahnya status gizi dan akses pelayanan kesehatan reproduksi.

3. *Pemenuhan Hak Atas Layanan Pendidikan;*
Pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender dilakukan dengan:
 - a) Perluasan kesempatan masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak melalui solusi yang diarahkan pada pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2008 dengan memberikan bantuan khusus bagi keluarga miskin, tanpa diskriminasi gender, dan memperluas kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi bagi anak yang berbakat dari keluarga miskin.
 - b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pelatihan bagi masyarakat miskin.

- c) Peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus bagi anak dengan kemampuan berbeda, pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam, tanpa diskriminasi gender.
4. *Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan*; Pemenuhan hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dilakukan melalui:
- a) Perluasan kesempatan kerja melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan usaha, dan arah solusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 - b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada pengembangan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan kemampuan kerja.
 - d) Peningkatan perlindungan sosial melalui solusi yang diarahkan pada perlindungan pekerja untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan kemanan kerja.
5. *Pemenuhan Hak Atas Perumahan*; Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan melalui:
- a) Perluasan kesempatan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman, dan sanitasi.

- b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada pengembangan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman bagi masyarakat miskin.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
 - d) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui solusi yang diarahkan pada pengembangan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa ada kompensasi.
6. *Pemenuhan Hak Atas Air Bersih*; Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman dilakukan melalui
- a) Perluasan kesempatan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin memperoleh air bersih.
 - b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan peranserta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola, memanfaatkan serta mengontrol sumberdaya air.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air bersih.
 - d) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui solusi yang diarahkan pada pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok

rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

7. *Pemenuhan Hak Atas Tanah*; Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah dilakukan melalui:
 - a) Perluasan kesempatan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender, dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif.
 - b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan peranserta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat.
 - d) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui solusi yang diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan.

8. *Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Dan SDA*; Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a) Perluasan kesempatan melalui solusi yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada peranserta organisasi dan lembaga masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan SDA dan LH.

- c) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui solusi yang diarahkan pada pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH yang berkelanjutan.
- d) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui solusi yang diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat miskin dari dampak bencana alam.

9. *Pemenuhan Hak Untuk Berpartisipasi*; Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan solusi publik dilakukan melalui:

- a) Perluasan kesempatan melalui solusi yang diarahkan pada perluasan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran program pembangunan, dan memperluas aksesibilitas masyarakat miskin terhadap perencanaan dan pengelolaan ruang publik.
- b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui solusi yang diarahkan pada pelembagaan partisipasi publik.

4.1.2.2 Solusi Pengurangan Beban Ekonomi

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat adalah melalui peningkatan program pengendalian jumlah penduduk (anak) dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB).

4.1.2.3 Solusi Pengurangan Ketidaksetaraan dan Keadilan Gender

Solusi yang harus dilakukan dalam mengurangi ketidaksetaraan dan keadilan gender adalah melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan peningkatan

produktifitas sehingga dapat mengurangi ketidak setaraan dan keadilan gender.

4.1.2.4 Solusi Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah baik dalam bentuk solusi dan strategi yang bertujuan mempermudah dan menyederhanakan proses pengentasan kemiskinan.

Disinilah kunci dan peran pemerintah dalam menghilangkan permasalahan dan mengentaskan kemiskinan, dalam hal ini ada dua macam solusi yang tepat guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Sungai Penuh diantaranya adalah:

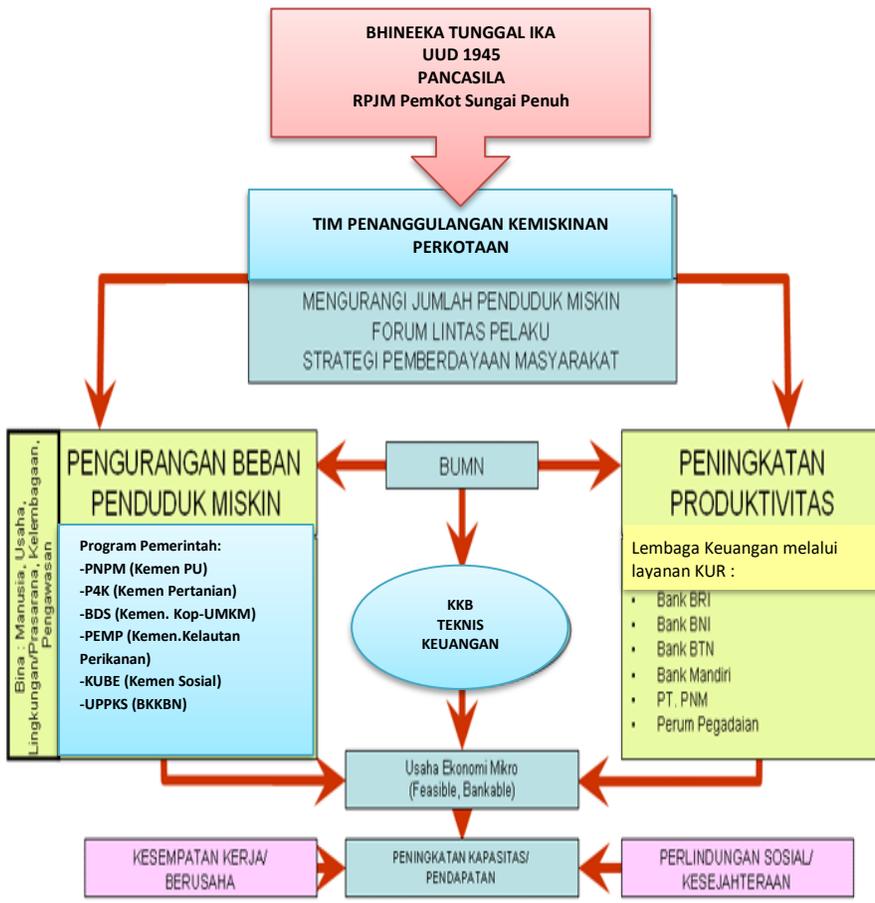
A. Solusi Lintas Pelaku

Inti dari solusi ini adalah meningkatkan kapasitas pendapatan penduduk miskin. Jika pendapatan penduduk miskin meningkat maka secara otomatis tingkat kesejahteraan penduduk miskin akan berkurang. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan produktifitas penduduk miskin dengan mengembangkan usaha ekonomi mikro yang didukung oleh bantuan modal dalam bentuk kredit yang berasal dari perbankan sebagai hasil dari kerjasama pemerintah dengan pihak perbankan.

Melalui bantuan tersebut maka usaha mampu tumbuh dan menciptakan kesempatan kerja. Semakin tinggi kesempatan kerja yang ada maka akan lebih cepat proses pengentasan kemiskinan. Selain dalam bentuk bantuan usaha, pemerintah juga harus memberikan dorongan terhadap penduduk miskin dalam hal pengurangan beban ekonomi yang bisa diberikan berbentuk bantuan langsung dan tunai hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pada saat mereka balum mulai memproduksi. Strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh ini akan lebih cepat terlaksana dan

tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh ini akan teratasi. Strategi ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Solusi Lintas Pelaku dalam Penanggulangan Kemiskinan



Solusi intervensi ini merupakan solusi mendasar yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, karena dengan solusi ini dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan dan kapan solusi yang tepat dapat diambil. Dalam solusi ini intervensi yang dilakukan dibagi dalam tiga kelompok umur:

- a) *Pertama* pada kelompok umur 0-15 tahun bentuk intervensi yang dilakukan melalui preparasi sarana sosial melalui pelayanan dasar dalam bentuk penyediaan pendidikan dan kesehatan yang memadai, yang pada tahap intervensi ini pelaku utamanya adalah pemerintah. Artinya semua sarana dan prasarana guna menyiapkan pelayanan sosial dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya.
- b) *Kedua* pada kelompok umur 15-55 tahun yang merupakan puncak produktifnya seseorang maka intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pengembangan usaha mikro yang didukung dengan bantuan kredit usaha mikro dengan kemudahan tanpa agunan. Setelah itu, peningkatan usaha mikro ini juga harus dilakukan dengan pendampingan usaha atau konsultan pengembangan usaha hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan menstabilkan usaha mikro tersebut setelah usaha mikro tersebut stabil dan berkembang dengan baik maka pendampingan bisa ditiadakan, pada proses ini pelaku utama yang bergerak adalah pihak perbankan dan dunia usaha. Selanjutnya pada kelompok umur.
- c) *Ketiga* pada phase ini diperlukan kembali peran pemerintah dimana pada kondisi umur tersebut penduduk miskin sudah tidak lagi produktif maka intervensi yang paling tepat adalah perlindungan sosial yang disalurkan melalui jaminan sosial melalui perlindungan berupa jaminan sosial ini maka kemiskinan pada usia ini dapat teratasi. Bila intervensi dilakukan tepat pada waktunya dengan ketentuan yang

yang ada maka jumlah penduduk miskin di Kota Sungai Penuh dapat teratasi. Deskripsi strategi intervensi secara rinci dimuat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2
Solusi Intervensi dalam Penanggulangan Kemiskinan



4.2 Strategi Terobosan Untuk Penanggulangan Kemiskinan

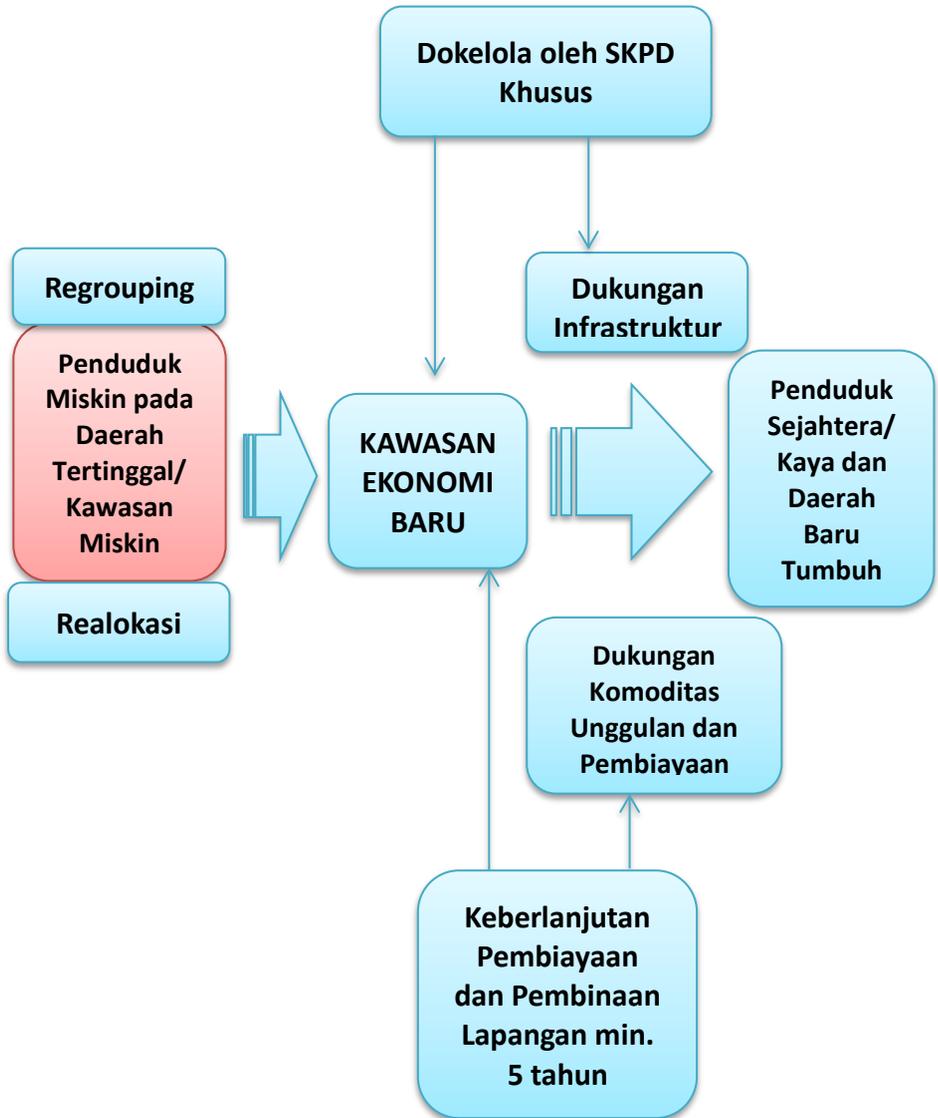
4.2.1 Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Sebaran penduduk miskin di perkotaan terlihat tidak terkonsentrasi pada kawasan tertentu. Penduduk miskin perkotaan sebagian ada yang menjadi pemulung, gelandangan dan pengemis serta buruh yang tinggal tidak tetap. Sebagian lagi ada yang tinggal pada kawasan kumuh di pinggir atau di tengah pusat kota.

Untuk mengatasinya, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada *regrouping* dan realokasi penduduk miskin tersebut melalui penciptaan kawasan baru atau kawasan khusus kumuh yang diperbaiki menjadi kawasan ekonomi baru. Kawasan tersebut dibangun untuk mengubah kawasan kumuh dengan penduduk miskin menjadi kawasan baru dengan penduduk yang menuju sejahtera, seperti kawasan penduduk miskin pada kawasan kumuh di Jakarta.

Pembangunan kawasan baru untuk penduduk miskin memerlukan pembinaan yang berlanjut oleh instansi pemerintah (OPD) khusus pula agar dapat menumbuhkembangkan komoditas unggulan dari kawasan yang didominasi penduduk miskin tersebut. Pada akhirnya, kawasan baru akan menjadi kawasan bernilai ekonomi dan penduduknya sejahtera pula.

Gambar 4.3
Skema Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru
untuk Penanggulangan Kemiskinan



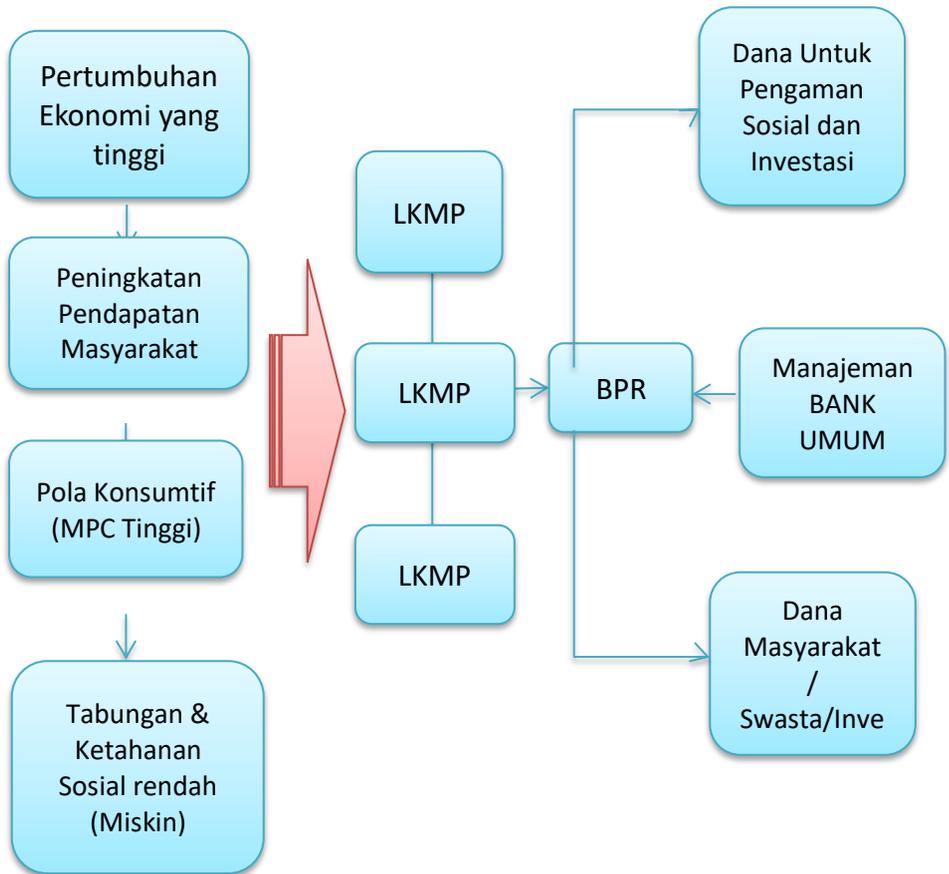
4.2.2 Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di perkotaan telah mendorong masyarakat menjadi konsumtif dan meningkatnya kesenjangan sosial antar golongan ekonomi. Akibatnya, tabungan rendah dan ketahanan sosial ekonomi juga menjadi rendah. Gaya hidup konsumtif rentan terhadap masyarakat menengah kebawah untuk menjadi miskin. Oleh karena itu, diperlukan strategi menahan perilaku konsumtif menjadi perilaku menabung pada lembaga keuangan yang mudah diakses, seperti lembaga keuangan mikro, (LKM) khusus untuk golongan ekonomi bawah.

LKM perkotaan tersebut akan membantu penduduk perkotaan yang rentan terhadap kemiskinan untuk menabung dan mendapatkan dana kredit mikro. Untuk itu, LKM dapat pula menjalin kerjasama dengan perbankan yang memiliki layanan kredit mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum yang memiliki jejaring layanan kredit usaha mikro.

Melalui skema layanan kredit mikro oleh perbankan, maka akan terjalin usaha yang saling menguntungkan dengan LKM yang anggotanya. Mayoritas penduduk miskin. Ada terjadi mobilisasi dana di sekitar penduduk miskin yang mendorong mereka lebih produktif. Deskripsi yang detil tentang skem pengembangan lembaga mikro untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan dimuat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.4
Skema Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan
Mikro Perkotaan (LKMP) untuk Penanggulangan
Kemiskinan



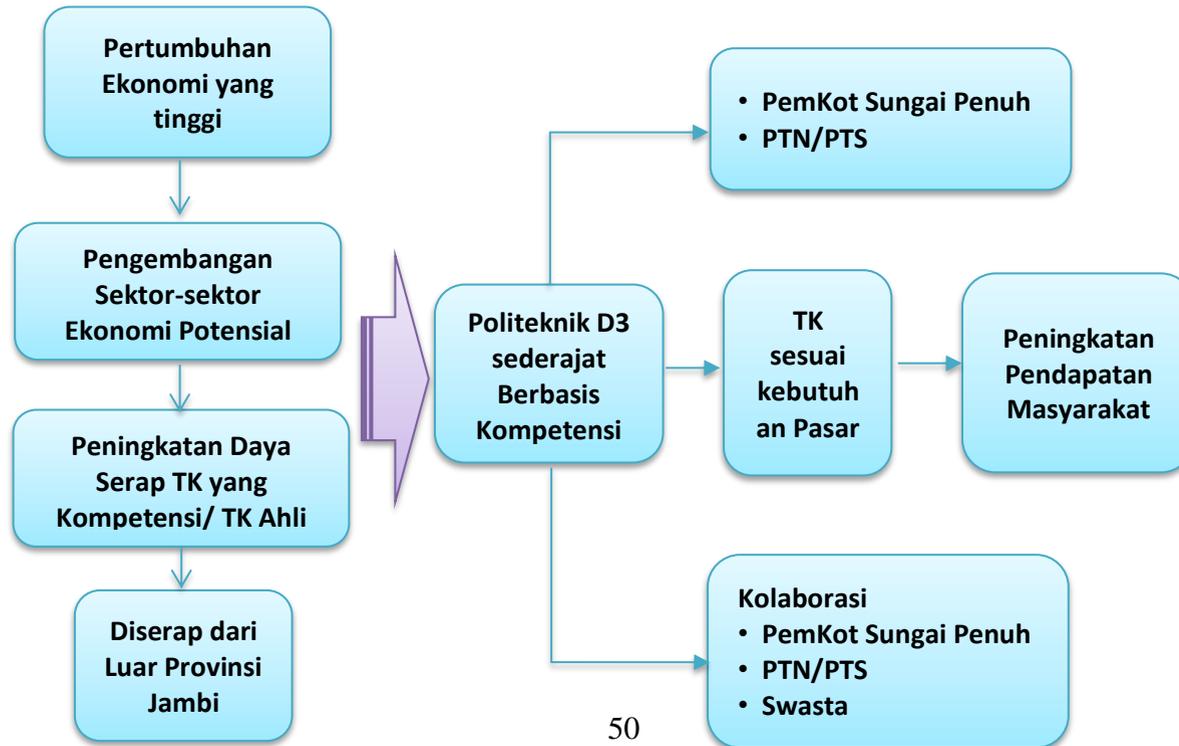
4.2.3 Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan SMK dan Politeknik Berbasis Kompetensi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia penduduk miskin diperlukan. Namun peningkatan kompetensi tersebut tidak cukup hanya melalui pendidikan gratis dan wajib belajar 9 tahun. penduduk miskin harus diberi pendidikan yang memiliki kompetensi untuk bekerja dan berusaha yang mampu mengubah kehidupannya. Oleh karena itu, putra-putri penduduk miskin harus diberi jaminan memperoleh pendidikan yang memberi mereka kompetensi untuk bekerja dan berusaha.

Pendidikan tersebut adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Politeknik D3 yang memberi bekal putra-putra penduduk miskin untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau terampil bekerja pada dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Kota bersama swasta dan pihak pengelola pendidikan SMK dan Politeknik harus berkolaborasi memberikan kesempatan dan membiayai bersama putra-putri penduduk miskin agar menjadi tenaga kerja yang terampil dan mandiri.

Bila putra-putri penduduk miskin sudah terampil dan mandiri maka akan berdampak terhadap ekonomi keluarga penduduk miskin. Peningkatan pendapatan putra-putri tersebut akibat mereka terampil dan mandiri akan meningkatkan pula kesejahteraan keluarganya atau menjadikan keluarganya tidak miskin lagi. Deskripsi lebih detail tentang strategi pengembangan lembaga pendidikan SMK dan Politeknik untuk penanggulangan kemiskinan dimuat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.5
Skema Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan dan SMK Politeknik Berbasis Kompetensi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan



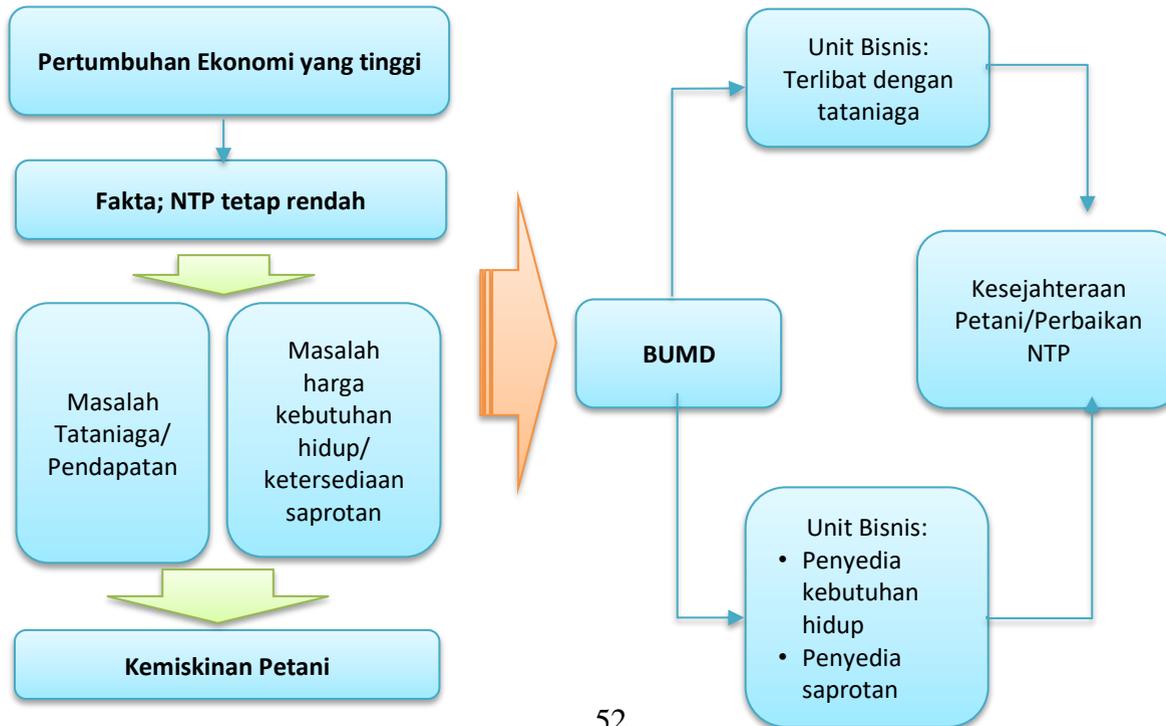
4.2.4 Strategi Pengembangan BUMD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan yang dialami petani di pinggiran perkotaan salah satunya disebabkan oleh nilai tukar petani (NTP) masih rendah. Akibatnya, daya beli petani rendah dan akhirnya menjadi miskin, padahal petani tersebut berada disekitar pinggiran kota.

Rendahnya NTP tersebut disebabkan oleh masalah tata niaga produk pertanian di pasar perkotaan dikuasai oleh koalisi pedagang di pasar induk atau pedagang besar yang mengakibatkan harga jual produk pertanian ditentukan oleh pedagang tersebut dan posisi petani di perkotaan dirugikan.

Pada sisi lain, harga kebutuhan input pertanian dan kebutuhan hidup petani diatas harga jual produk yang dihasilkan petani. Kondisi ini menimbulkan petani yang berada di pinggiran kota menjadi miskin. Untuk mengatasinya, diperlukan proteksi dari Pemerintah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). BUMD diminta untuk membantu petani di pinggiran kota melalui unit bisnis BMD. Unit bisnis tersebut dapat bekerja sama dengan kelompok tani atau koperasi petani guna meningkatkan posisi tawar petani. Disamping itu, BUMD juga dapat melakukan pembinaan agar nilai tambah produk pertanian yang dimiliki petani pinggiran kota dapat meningkat. Deskripsi rinci tentang strategi yang melibatkan BUMD untuk penanggulangan kemiskinan kalangan petani pinggiran perkotaan dapat dilihat pada skema berikut ini.

Gambar 4.6
Strategi Pengembangan BUMD untuk Penanggulangan Kemiskinan



Bab 5

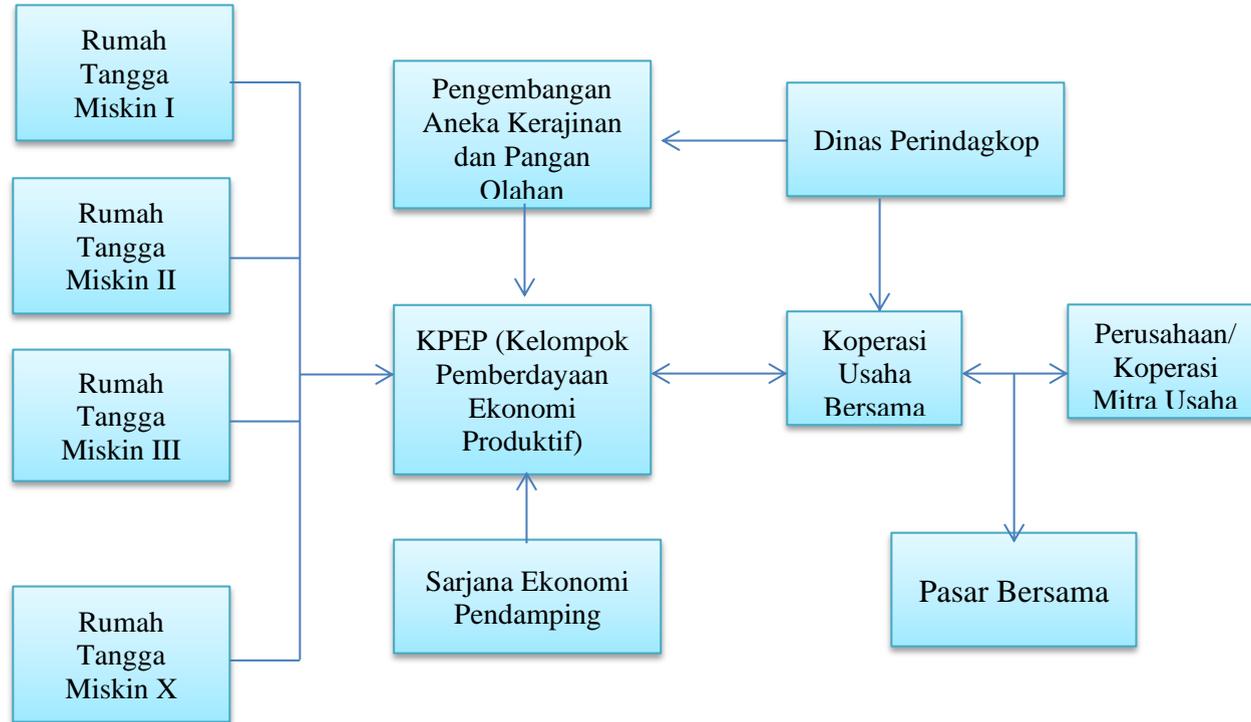
MODEL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Model Penanggulangan Kemiskinan

5.1.1 Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Model pengembangan dan pemberdayaan rumah tangga miskin harus berbasis pada sumberdaya yang dimiliki rumah tangga miskin dan potensi pasar yang menjadi target pengembangan dan pemberdayaan ekonomi produktif dari rumah tangga miskin tersebut. Untuk itu, pengembangan dan pemberdayaan lebih praktis difokuskan kepada kegiatan pembuatan aneka kerajinan dan pengolahan aneka pangan olahan melalui kelompok ekonomi produktif yang anggotanya adalah kepala keluarga dari rumah tangga miskin. Deskripsi dari pengembangan dan pemberdayaan ekonomi produktif rumah tangga miskin dipaparkan kedalam skema model pengembangan dan pemberdayaan berikut ini.

Gambar 5.1 Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Produktif Rumah Tangga Miskin

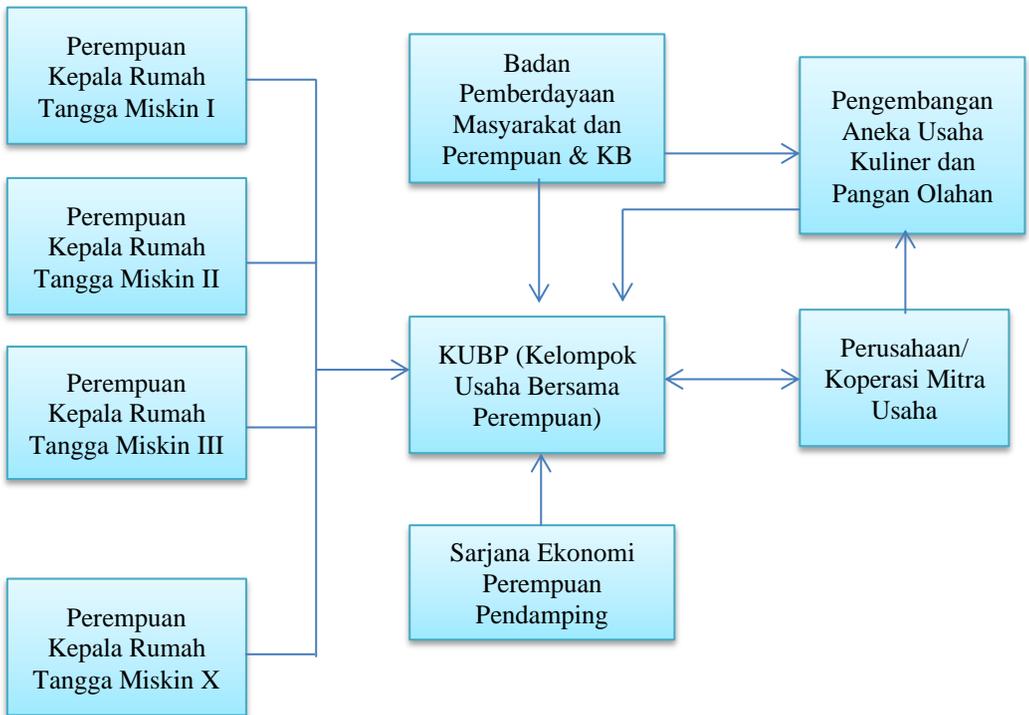


Paparan skema model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi produktif di atas mengisyaratkan bahwa kelompok pemberdayaan ekonomi produktif (KPEP) harus didampingi oleh sarjana ekonomi pendamping dan Dinas Perindagkop harus pula melakukan pembinaan yang berlanjut minimal selama 3 tahun berturut-turut. Disamping itu, model tersebut menginginkan adanya kerjasama yang baik antara KPEP dengan perusahaan/koperasi dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan.

5.1.2 Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin punya tanggungjawab ganda. Disatu sisi, perempuan ibu bagi anak-anak dan disisi lain berperan sebagai pencari nafkah keluarganya. Oleh karena itu, para perempuan tersebut harus dibantu dan diberdayakan secara minat dan kemampuannya. Usaha kuliner dan pangan usaha mayoritas diminati perempuan yang menjadi pimpinan rumah tangga miskin. Guna mendukung usaha tersebut perlu diberikan bantuan modal dan pendampingan teknis bagi perempuan yang tergabung kedalam KUBP (Kelompok Usaha Bersama Perempuan) yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan & KB serta Sarjana Ekonomi pendamping. Deskripsi model pengembangan dan pemberdayaan tersebut dijabarkan kedalam skema berikut ini.

**Gambar 5.2 Model Pengembangan dan Pemberdaya
Ekonomi Perempuan Rumah Tangga Miskin**

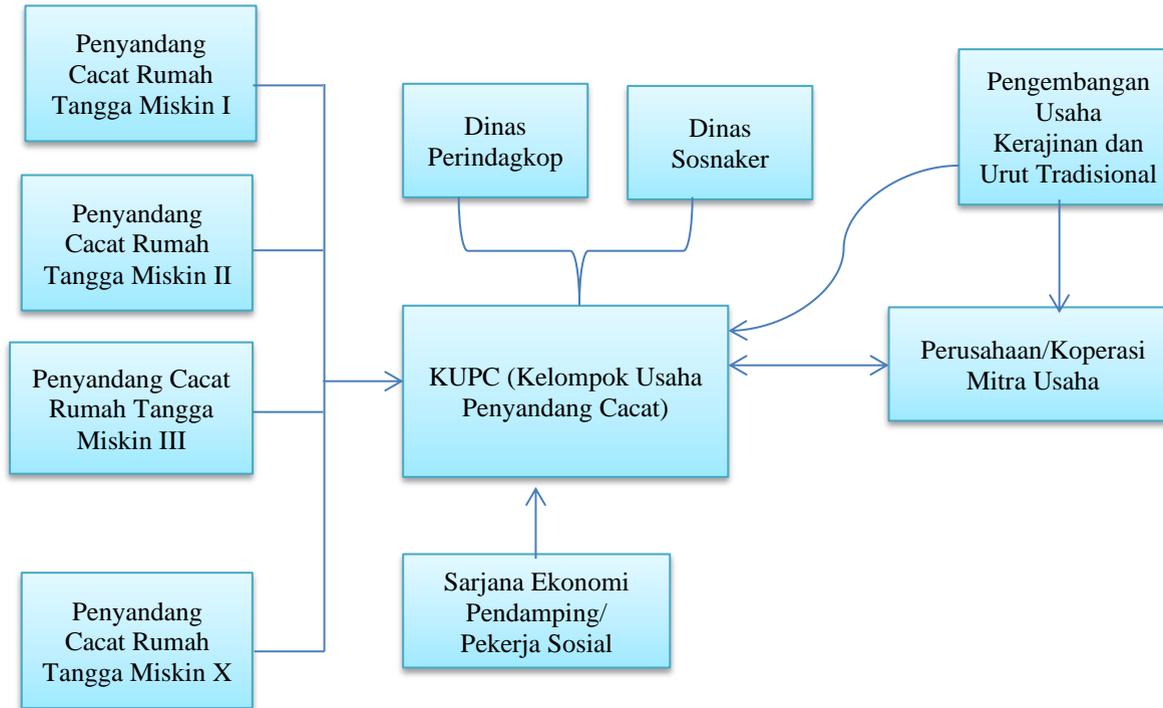


Sajian skema di atas memperlihatkan bahwa KUBP yang anggotanya perempuan dari rumah tangga miskin harus melakukan kemitraan dengan badan usaha lain yang terkait dengan pemasaran dari produk yang dihasilkan KUBP. Produk kuliner dan pangan olahan lebih tepat bermitra dengan perusahaan mini market dan koperasi karyawan pengelola kantin sekolah/kantor.

5.1.3 Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Cacat

Para penyandang cacat dan keluarga rumah tangga miskin harus ditumbuhkembangkan dan diberdayakan ekonominya. Penyandang cacat tersebut harus digroupkan menjadi KUPC (Kelompok Usaha Penyandang Cacat). Mereka tidak dibolehkan menjadi orang yang memintaminta/pengemis tetapi menjadi orang yang produktif. Usaha kerajinan tangan dan usaha jasa urut tradisional layak dikembangkan dikalangan penyandang cacat dari rumah tangga miskin. Untuk itu, mereka harus dilatih dan dibina agar trampil membuat kerajinan tangan dan menjadi juru urut tradisional. Skema model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi penyandang cacat dimuat pada gambar berikut ini.

**Gambar 5.3 Model Pengembangan dan PEMBERDAYAAN Ekonomi
Penyanggah Cacat Rumah Tangga Miskin**



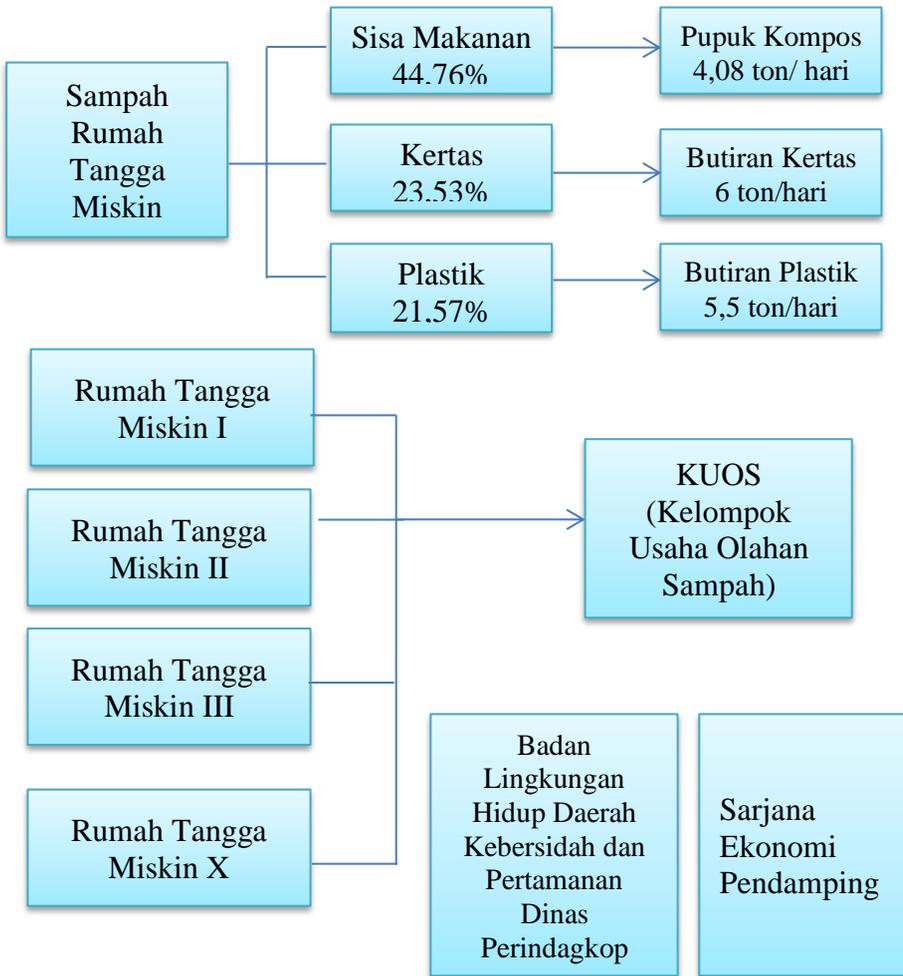
Gambar diatas menginginkan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi penyandang cacat dari rumah tangga miskin perlu pembinaan yang berlanjut dari Dinas Sosnaker dan Dinas Perindagkop agar mereka yang memiliki instabilitas tersebut dapat menjadi mandiri dalam ekonomi atau memiliki pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan ekonominya sehari-hari.

5.1.4 Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Persampahan

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dapat pula berbasis pada ekonomi persampahan. Hasil studi timbulan sampah Kota Sungai Penuh tahun 2014 didapati potensi sampah Kota Sungai Penuh dapat diolah menjadi produk yang bernilai guna kembali seperti pupuk kompos serta butiran kertas dan plastik.usaha mengolah sampah menjadi produk tersebut dapat dilakukan rumah tangga miskin melalui kelompok usaha olahan sampah (KUOS). Kelompok usaha tersebut harus dibina oleh BLH dan KP dan Dinas Perindagkop serta didampingi oleh Sarjana Ekonomi pendamping.

Disamping itu, KUOS milik rumah tangga miskin harus bermitra dengan kelompok tani dalam memasarkan pupuk organik (pupuk kompos) dan industri/pedagang yang terkait dengan pemasaran butiran kertas/plastik yang dihasilkan KUOS. Paparan detil tentang model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi persampahan rumah tangga miskin disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.4 Model Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Persampahan Rumah Tangga Miskin



5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan

5.2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Rumah Tangga Miskin

Guna meningkatkan mutu infrastruktur yang dimiliki rumah tangga miskin maka diperlukan minimal 2 program dan 4 kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Adapun kedua program tersebut adalah peningkatan mutu bangunan dan sanitasi lingkungan rumah tangga miskin serta pembangunan jalan dan drainase lingkungan pada lingkungan rumah tangga miskin. Melalui kedua program tersebut diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas fisik rumah dan lingkungan rumah tangga miskin kearah yang lebih baik dan sehat. Deskripsi program beserta kegiatan pembangunan infrastruktur bagi rumah tangga miskin dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Rumah Tangga Miskin

No	Program	Kegiatan	OPD Terlibat
1	Peningkatan mutu bangunan dan sanitasi lingkungan rumah tangga miskin	a. Rehabilitasi fisik rumah rumah tangga miskin b. Pembangunan MCK dan Septictank rumah tangga miskin	- Dinas Pekerjaan Umum
2	Pembangunan jalan dan drainase lingkungan pada lingkungan rumah tangga miskin	a. Pembangunan jalan lingkungan yang beraspal pada lingkungan rumah tangga miskin b. Pembangunan drainase penampungan air limbah dan air	- Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Pekerjaan Umum

		hujan pada lingkungan rumah tangga miskin	
--	--	---	--

5.2.2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kesehatan

Peningkatan mutu kesehatan keluarga dan lingkungan rumah tangga miskin merupakan suatu keharusan agar rumah tangga miskin dapat lebih sehat. Untuk itu, diperlukan 3 program beserta 6 kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesehatan rumah tangga miskin. Ketiga program tersebut adalah peningkatan mutu kesehatan keluarga peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan peningkatan pengobatan penyakit kronis pada rumah tangga miskin. Deskripsi lebih rinci tentang 3 program tersebut beserta kegiatannya dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Untuk Rumah Tangga Miskin

No	Program	Kegiatan	OPD Terlibat
1	Peningkatan mutu kesehatan keluarga rumah tangga miskin	a. Membangun PUSKESMAS khusus untuk rumah tangga miskin/penduduk miskin b. Meningkatkan kunjungan para medis ke rumah tangga miskin berkala, minimal 1 kali/bulan	- Dinas Kesehatan - PUSKESMAS
2	Peningkatan kualitas kesehatan	a. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian	- Dinas Kesehatan

	lingkungan rumah tangga miskin	<p>kualitas kesehatan lingkungan rumah tangga miskin</p> <p>b. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian penyakit menular dilingkungan rumah tangga miskin</p>	- Laboratorium Kesehatan Lingkungan
3	Peningkatan pengobatan penyakit kronis rumah tangga miskin	<p>a. Meningkatkan kunjungan dokter keluarga ke rumah tangga miskin penyandang penyakit kronis</p> <p>b. Meningkatkan pemberian obat gratis berlanjut bagi penyandang penyakit kronis pada rumah tangga miskin</p>	- Dinas Kesehatan - PUSKESMAS

5.2.3 Program dan Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Latihan

Peningkatan skill dari tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga miskin diperlukan agar kompetensi dan daya juang mereka menjadi tinggi dan dapat keluar dari kemiskinan. Karena itu, pemberian bekal pendidikan dan latihan untuk mereka merupakan suatu keharusan. Sekurangnya dibutuhkan 3 program yang terkait dengan pendidikan dan latihan bagi rumah tangga miskin. Adapun ketiga program tersebut adalah pengembangan sekolah keterampilan lapangan, peningkatan life skill, dan peningkatan kompetensi anak didik dari rumah tangga miskin. Jabaran program dan kegiatannya dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Program dan Kegiatan Peningkatan Pendidikan & Latihan Untuk Rumah Tangga Miskin

No	Program	Kegiatan	OPD Terlibat
1	Pengembangan sekolah ketrampilan lapangan untuk rumah tangga miskin	a. Membangun sekolah lapangan khusus untuk kerajinan dan kuliner b. Membangun sentra pendidikan ketrampilan pada SMK terpilih	- Dinas Pendidikan - Dinas Perindagkop
2	Peningkatan Life Skill untuk Tenaga Kerja dari Rumah Tangga Miskin	Menumbuhkembangkan kegiatan life skill bagi tenaga kerja dari rumah tangga miskin	- Dinas Pendidikan
3	Peningkatan kompetensi anak didik dari rumah tangga miskin	Membangun laboratorium kompetensi khusus untuk anak didik dari rumah tangga miskin pada SMK dan Politeknik	- Dinas Pendidikan - Dinas Sosnaker

5.2.4 Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi bagi rumah tangga miskin memerlukan dukungan pembiayaan dan teknis dari OPD terkait seperti Dinas Perindagkop, Dinas Sosnaker, Dinas Pertanian dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan & KB serta BLH dan KP. Oleh karena itu, program dan kegiatannya harus dilaksanakan secara lintas pelaku OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Minimal dibutuhkan 4 program untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin. Keempat program tersebut adalah peningkatan ekonomi produktif, pengembangan usaha bersama perempuan, pengembangan usaha kerajinan dan jasa urut, dan pengembangan usaha olahan sampah. Deskripsi lebih detail tentang program dan kegiatannya dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4 Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Miskin

No	Program	Kegiatan	OPD Terlibat
1	Peningkatan Ekonomi Produktif Rumah Tangga Miskin	a. Menumbuhkembangkan usaha olahan aneka kerajinan b. Menumbuhkembangkan usaha pangan olahan	- Dinas Perindagkop
2	Pengembangan Usaha Bersama Perempuan pada Rumah Tangga Miskin	a. Menumbuhkembangkan aneka usaha kuliner oleh perempuan b. Menumbuhkembangkan usaha pangan olahan oleh perempuan	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan & KB - Dinas Perindagkop

3	Pengembangan Usaha Kerajinan dan Jasa Urut bagi Penyandang Cacat Rumah Tangga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkembangkan usaha kerajinan bagi penyandang cacat b. Menumbuhkembangkan jasa urut tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosnaker - Dinas Perindagkop
4	Pengembangan Usaha Olahan Sampah Oleh Rumah Tangga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkembangkan usaha olahan pupuk organik (kompos) b. Menumbuhkembangkan usaha olahan butiran kertas dan plastik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian - BLH dan KP - Dinas Perindagkop

5.2.5 Program dan Kegiatan Kemitraan Usaha

Pengentasan ekonomi rumah tangga miskin memerlukan kemitraan dengan perusahaan/bdan usaha lain yang sudah mapan seperti BUMD/BUMD/BAZNAS. Melalui kemitraan tersebut keterlibatan rumah tangga miskin lebih tinggi dan aktif untuk kemajuan ekonomi keluarga rumah tangga miskin. Kemitraan usaha yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan lebih edukatif dan mengajar rumah tangga miskin mandiri. Untuk itu, diperlukan minimal 2 program dan 4 kegiatan tentang kemitraan usaha untuk rumah tangga miskin. Adapun kedua program tersebut adalah pengembangan kemitraan usaha mikro dengan BUMD/BUMN/BAZNAS dan peningkatan pemanfaatan CSR untuk usaha produktif rumah tangga miskin. Deskripsi lebih detil kedua program tersebut beserta kegiatannya dimuat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Kemitraan Usaha
Untuk Rumah Tangga Miskin**

No	Program	Kegiatan	OPD Terlibat
1	Pengembangan kemitraan usaha mikro dengan BUMD/BUMN dan BAZDA/BAZNAS untuk rumah tangga miskin	a. Mengembangkan kemitraan bisnis antara kelompok usaha milik rumah tangga miskin dengan BUMD/BUMN b. Mengembangkan kemitraan usaha berbasis syariah dengan BAZDA/BAZNAS	- Kabag Ekonomi Setda Kota - BAZDA/BAZNAS
2	Peningkatan pemanfaatan CSR untuk usaha produktif rumah tangga miskin	a. Mengembangkan usaha ekonomi produktif milik kelompok rumah tangga miskin dengan pembiayaan CSR b. Menumbuhkembangkan kemitraan bisnis dengan perusahaan pelaksana CSR	- PT. Bank Jambi - PT. Perkebunan Nusantara VI

Bab 6

PENUTUP

Penanggulangan kemiskinan daerah memerlukan kerja yang serius dari OPD yang terlibat. Sinergi antara program dan kegiatan dari OPD pelaku diperlukan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan juga harus bersifat partisipasi dan edukatif serta harus dihindari kegiatan yang bersifat charity dan sinterklass yang cenderung mengkondisi rumah tangga miskin happy sesaat dan setelah kegiatan berakhir akan kembali miskin lagi.

Di samping itu, penanggulangan kemiskinan juga harus dapat memenuhi kebutuhan dasar para keluarga rumah tangga miskin. Kebutuhan dasar yang bersifat emergensi perlu diatasi segera tetapi keberlanjutannya juga perlu disiapkan agar rumah tangga miskin dapat mandiri dalam mengatasi sendiri dikemudian hari. Dalam mengaplikasikan strategi dan model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk rumah tangga miskin harus dilakukan secara berlanjut minimal untuk 3 tahun dan diikuti pula dengan pendampingan lapangan.

Pada sisi lain, untuk mengaplikasikan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan diperlukan database yang valid. Oleh karena itu, database yang dipublikasikan oleh BPS dapat dijadikan acuan dalam penentuan sasaran dari kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan. Data BPS tersebut dapat diperluas dan

disesuaikan dengan target yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, M., Amrizal, M. H., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2016). Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan). *Pamator Journal*, 9(2), 95–102. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3373>
- Banito, F. R., Rasjid, M. R., & Zulfanetti. (2022). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Paradigma Ekonomika*, 17(1). <https://doi.org/10.53978/jd.v9i1.171>
- Esariti, L., Haulah, L., & Sunarti, S. (2019). Pengarusutamaan Gender dalam Program Gerbang Hebat sebagai Strategi Gender Mainstreaming Integration into Poverty Alleviation Program. *Tataloka*, 21(1), 140–152.
- Humalangi, M., Si, M., Lantapo, N. N., Pt, S., Butolo, M. S. I., Muhammad, A., Arham, M. E. R., & Tantawi, S. E. (2023). Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Gorontalo. In *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/488>
- Junus, D. (2004). Kemitraan Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 134–146.
- Machmud, J., Mokodompiti, N. E., & Kasim, R. (2020). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *JPPE. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 3(1), xx–xx.

- Nurafni, H., Rachmad, M. R., & Safri, M. (2021). *Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi*. 16(4), 689–704.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Mengatasi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Rahman, Y. A. (2010). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) Di Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Tahun 2007. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 3(1), 64–74.
- Ridena, S. (2020). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- Saptono, A. (2013). EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat). *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 11(2), 29–54. <https://doi.org/10.21009/econosains.0112.03>
- Setya, P. A. dan U. S. (2018). Analisis Implementasi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik (e-JKPP)*, 04(1).
- Tahitu, A., & Lawalata, C. M. . (2017). Kemiskinan Perkotaan: Strategi Pemulung Di Kota Ambon. *Sosio Informa*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.388>
- Waspada, I. (2016). Penataan Lingkungan Kemiskinan

Perkotaan (Suatu Studi Program P2KP di Kota Bandung). *Jurnal Geografi Gea*, 7(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1710>

Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218.

